

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

## **Tingkat Perkembangan Harga Konsumen di Kabupaten Klungkung pada Triwulan III Tahun 2022**

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten Non IHK (Indeks Harga Konsumen), untuk mengetahui tingkat perkembangan inflasi tingkat perkembangan harga konsumen di Kabupaten Klungkung dapat menjadikan Kota Denpasar sebagai rujukan tingkat perkembangan inflasi di Kabupaten/Kota. Sedangkan tingkat perkembangan harga konsumen, bisa dipantau melalui Sistem Informasi harga pangan utama (SiGapura) yang diinput oleh Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Kabupaten Klungkung.

Data pemantauan tingkat perkembangan harga konsumen selama Triwulan III tahun 2022 sebagai berikut :

1. Beras lokal terpantau mengalami kenaikan harga dimana pada Bulan Juli Rp.10.000,-/kg dan mengalami kenaikan pada Bulan Agustus sehingga harga beras menjadi Rp.10.500,-/kg dan terakhir pada Bulan September pada posisi harga Rp.11.000,-/kg.
  2. Harga beras premium pada Bulan Juli posisi harga Rp.11.000,-/kg, pada Bulan Agustus mulai mengalami kenaikan harga Rp.11.800,-/kg dan terakhir pada posisi harga Rp.12.000,-/kg.
  3. Harga bawang merah Kintamani terus mengalami penurunan harga, hal ini terpantau dari harga bawang merah pada Bulan Juli sebesar Rp. 47.500,-/kg, pada bulan Agustus menjadi Rp. 26.200,-/kg, dan terus mengalami penurunan harga pada bulan September menjadi Rp. 20.400,-/kg.
  4. Harga bawang merah Bima juga terpantau mengalami penurunan harga, pada Bulan Juli Rp.50.750,-/kg dan terakhir pada posisi harga Rp.21.800,-/kg.
  5. Harga cabai rawit merah mengalami penurunan harga, hal ini terpantau dari harga cabai rawit merah pada awal Juli 2022 berada pada posisi harga Rp. 68.750,-/kg, dan terus mengalami penurunan harga yang sangat signifikan ( Rp. 22.550,-/kg) sampai pada akhir bulan September
  6. Harga minyak goreng curah terpantau mengalami penurunan harga, dimana pada awal Juli harga minyak goreng curah berada pada kisaran harga Rp. 15.000,-/ltr, dan mengalami penurunan harga pada bulan September menjadi Rp. 14.000,-/kg.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

# Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi harga konsumen pada Tri Wulan ke III tahun 2022 di Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Harga beras lokal dan beras premium mengalami kenaikan harga karena harga gabah naik dengan kisaran harga Rp.5.000,- sampai dengan 5.200,-/kg.

2. Harga konsumen bawang merah dan cabai terus mengalami penurunan harga, hal ini disebabkan karena bawang merah menjadi salah satu komoditas pangan hortikultura yang tingkat harga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, cuaca dan musim panen. Pasokan komoditas bawang didatangkan dari Bima dan Kabupaten Bangli, sedangkan di Kabupaten Klungkung sentra produksi cabe ada di Subak Selisihan Kawan, Subak Pegatepan, Subak Kacang Dawa, Subak Pau dan subak Penasan.

3. Harga minyak goreng curah terpantau mengalami penurunan harga, dimana kondisi ini disebabkan oleh salah satu faktor kebijakan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng di dalam negeri, termasuk dengan menerapkan wajib pemenuhan domestik (DMO) dan harga domestik (DPO). Produsen CPO dan minyak goreng di dalam negeri harus menjalankan DMO untuk bisa mendapatkan izin ekspor.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Dalam mengantisipasi tantangan peningkatan inflasi daerah baik internal maupun eksternal, Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kabupaten Klungkung mengotimalkan pengendalian inflasi daerah melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) melalui kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Program Pengendalian inflasi Daerah Kabupaten Klungkung sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 2% digunakan untuk mengendalikan kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah. Pemberian BLT mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 134 tahun 2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Rp. 1.184.850.000,- terdiri dari :
2. Bantuan Langsung Tunai kepada UMKM 474.750.000,-
3. Bantuan Langsung Tunai kepada Nelayan 710.100.000,-
4. Penciptaan Lapangan Kerja Rp.1.410.750.000,- terdiri dari:
5. Padat Karya pembukaan Jalan Baru (3 Lokasi) 1.410.750.000,-
6. Subsidi Sektor Transportasi Rp.66.150.000,- terdiri dari:
7. Bantuan Langsung Tunai kepada Sopir Angkutan Perdesaan Rp.66.150.000,-

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi harga konsumen pada Triwulan III Tahun 2022 di Kabupaten Klungkung meliputi :

### 1. KETERSEDIAAN PASOKAN

- Tim Satgas Ketahanan Pangan Kab Klungkung
  - Melakukan monitoring terhadap ketersediaan stock bahan pangan pokok dan stabilitas harga, serta kelancaran distribusi pangan.
- Dinas Pertanian Kab Klungkung
  - Strategi pemenuhan kebutuhan karbohidrat, dengan program peningkatan produksi lokal mendukung stock bahan pangan pokok seperti beras dan jagung. Kegiatan kampanye konsumsi non beras dan konsumsi beras lokal
  - Pengembangan Inovasi Bima Juara
  - Pembuatan demplot pertanian seperti demplot cabai, padi organik, kedelai dan tanam bawang merah
- Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Kelautan Kab Klungkung
  - Mengantisipasi pemantauan monitoring distribusi dan stock bahan pangan pokok untuk pemenuhan informasi melengkapi laporan dengan melakukan monitoring harga bahan pangan menasar pedagang secara bergilir sehingga pedagang tidak merasa terganggu,
  - Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan barang penting lainnya serta melakukan pengawasan distribusi barang melalui monitoring terhadap distributor dengan membentuk Tim Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan.

### 2. KETERJANGKAUAN HARGA

- Melakukan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Klungkung, melalui program kegiatan pengendalian inflasi yang menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rapat koordinasi pengendalian inflasi dan program inovatif pengendalian inflasi daerah.
- Melakukan kegiatan Pasar Murah untuk Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting lainnya (Bapokting) sebagai upaya antisipasi inflasi dampak kenaikan BBM di Kecamatan Nusa Penida bekerjasama dengan Holding PT Mitra Gema Santi, Koperasi dan Bumdesma untuk menjamin dan menjaga stabilitas harga serta masyarakat memperoleh barang pangan dengan harga yang lebih

### 3. KELANCARAN DISTRIBUSI

- Dinas Perhubungan melalui program kerja peningkatan dan pengembangan dan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan pokok melalui penambahan trip Kapal Roro untuk menjaga kelancaran pendistribusian logistik dan kebutuhan bahan pangan pokok penting lainnya di Kecamatan Nusa Penida melalui penerapan sistem prioritas penyeberangan;
- Memberikan subsidi biaya angkut kebutuhan bahan pangan pokok penting lainnya menuju Kecamatan Nusa Penida, melalui penerapan sistem prioritas penyeberangan;
- Melakukan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Klungkung, melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur seperti:
  - Kegiatan perbaikan dan peningkatan struktur jalan pada tahun 2022 di

anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan rincian kegiatan di Kecamatan Nusa Penida sebesar Rp. 900.000.000,- dan wilayah Klungkung Daratan sebesar Rp. 1.600.000.000,-

- Mengoptimalkan sarana produksi dan infrastruktur pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi pertanian sampai Tri Wulan II sudah realisasi 850 M dengan target 1.500 M/tahun.

#### 4. KOMUNIKASI EFEKTIF

- Dinas Koperasi,UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab Klungkung
  - Melakukan koordinasi penginputan di Aplikasi SiGapura pada 5 (lima) pasar tradisional untuk pemantauan harga (18 item bahan pokok) dan sebagai operator SIGAPURA untuk pengisian data harga (harian) dan stock (Mingguan) komoditas bahan pangan yang berkualitas pada Website SIGAPURA Kab Klungkung. Menunjuk 5 (lima) pasar di Kabupaten Klungkung
  - Pengajuan usulan pemasangan 2 unit LED yaitu di Pasar Galiran dan Pasar Mentigi Nusa Penida untuk menginformasikan harga komoditas pangan kepada masyarakat
- Dinas Komunikasi dan Informatika
  - Melakukan monitoring dan pengendalian inflasi daerah melalui pemanfaatan website Klungkung.go id
  - Melakukan siaran radio dalam rangka penyampaian dan menginformasikan harga kebutuhan pangan pokok di Kabupaten Klungkung
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab Klungkung
  - Memperbaiki kualitas data dengan penambahan 3 (tiga) pelaku usaha sebagai sumber data pasokan terhadap data pemantauan 20 item bahan pokok

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Klungkung pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu upaya penguatan koordinasi dan kerjasama antara daerah dalam rangka meningkatkan penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas di Kabupaten Klungkung;
2. Menjaga kestabilan pendistribusian kebutuhan bahan pangan pokok di wilayah Kecamatan Nusa Penida;
3. Optimalisasi implementasi inovasi Bima Juara sebagai Pilot Project ketahanan pangan serta mengoptimalkan demplot pertanian khususnya komoditas pangan yang produksinya terbatas di kabupaten klungkung.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

# **Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Kebijakan Pengendalian Inflasi oleh Tim Inflasi Daerah Kabupaten Klungkung pada Triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut :

- Melakukan survey harga dan pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pangan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Klungkung;
- Mengoptimalkan kegiatan pasar murah/operasi pasar bekerjasama dengan holding PT Mitra Gema Santi, Koperasi dan Bumdesma sebagai upaya antisipasi inflasi dampak kenaikan BBM untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan barang pokok penting lainnya;
- Meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah (Kabupaten/Kota atau antar Provinsi) penghasil komoditas bahan pangan pokok yang berdampak terhadap meningkatnya inflasi di Kabupaten Klungkung;
- Mendorong percepatan pembentukan BUMD Pangan guna mempermudah fasilitasi kerjasama antar daerah serta melakukan inovasi dalam hal kelancaran distribusi antar wilayah Kabupaten Klungkung.